

**ANALISIS HUKUM SETORAN MODAL SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PKPU
OLEH PEMEGANG SAHAM TERHADAP PT.X BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Jennifer Andrea

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S., Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau yang juga disebut sebagai PKPU, merupakan salah satu upaya hukum pelunasan utang yang menitikberatkan pada kepentingan pihak kreditor maupun debitor dengan cara memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk memusyawarahkan tata cara pelunasan utang. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan kasus dimana PKPU disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah dimana pemegang saham mengajukan permohonan PKPU terhadap PT.X untuk menuntut pengembalian segenap setoran modal yang telah diserahkannya sejak tahun 2004 atas dasar tidak dilakukannya perubahan Anggaran Dasar PT.X. Penelitian melalui skripsi ini bertujuan untuk menganalisa permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang saham berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penambahan modal PT dan persyaratan pengajuan permohonan PKPU. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum dibuatnya Anggaran Dasar yang baru tidak membatalkan Keputusan RUPS untuk menambahkan modal sehingga setoran modal yang telah diserahkan kepada PT.X tidak dapat diartikan sebagai utang. Oleh karena itu, permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang saham tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada unsur utang. Alhasil, permohonan PKPU yang ada dalam kasus ini tidak seharusnya dikabulkan.

Kata kunci : *Perseroan Terbatas, penambahan modal, PKPU*

**LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF PAID-UP CAPITAL AS THE GROUND
REASON TO FILE A PETITION OF SUSPENSIONS OF PAYMENT ACCORDING
TO UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Jennifer Andrea

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S., Dr. Sylvia Janisriwati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Suspension of payment is one of the legal procedures to ensure debt recovery that prioritizes the interests of both creditors and debtors in a way that both parties discuss payment plans in debt adjustment. Unfortunately, there are few cases where one party has bad faith in filing the petition of suspension of payments, for example where shareholder filed suspensions of payment over paid-up capitals towards its company, which is called PT.X, due to the absence of changes in PT.X's article of association. This research is conducted to evaluate the petition of suspensions of payment filed based on the legal provision that applies for requirements of capital increase and requirements of suspensions of payment. The study concluded that the decision coming from general meetings of shareholders to increase paid-up capital is valid and binding despite the fact that there were no changes in the company's articles of association. Therefore, the paid-up capital can't be interpreted as debt. For that reason, the petition of suspensions of payment filed doesn't meet the requirements instructed by Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang and the petition shouldn't be granted.

Keywords: *Incorporated company, capital increase, suspension of payment*

